

# EKSPLOITASI EKONOMI PENDUDUKAN JEPANG DI SURAKARTA (1942-1945)

*Julianto Ibrahim\**

## ABSTRAK

Tulisan ini mengungkapkan eksploitasi ekonomi yang dilakukan pemerintah militer Jepang di Surakarta. Kebijakan dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber bahan makanan pokok dan penanaman paksa terhadap tanaman yang menguntungkan untuk perang. Sumber bahan makanan pokok yang wajib dikumpulkan adalah padi, gaplek, jagung, kapas, dan rosela. Pengumpulan padi dan gaplek yang sangat eksploitatif menyebabkan masyarakat Surakarta mengalami kekurangan pangan, sehingga banyak di antara mereka mengkonsumsi makanan yang tidak layak dimakan, yaitu bonggol pisang dan bonggol sente.

Kata kunci : Jepang - eksploitasi - ekonomi - Surakarta

## PENGANTAR

Tahun-tahun terakhir kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia telah mengubah kondisi kehidupan rakyat menjadi kritis.<sup>1</sup> Kekurangan pangan, sandang, papan, dan rendahnya tingkat kesehatan telah lama membebani pundak rakyat. Di sisi lain, upah kerja yang rendah, rutinitas kerja paksa dan pajak yang harus dibayar, berjalan begitu saja dalam upaya eksploitasi dengan diiringi diskriminasi. Pemerintah kolonial cenderung mengeruk keuntungan, yang semakin lama akan membuat keruhnya masa depan, yang tidak saja menimpa rakyat Indonesia, tetapi juga kelangsungan pemerintahan Hindia Belanda.<sup>2</sup>

Keruhnya kekuasaan kolonial Belanda mencapai puncaknya pada saat pasukan Jepang mulai menduduki Indonesia.<sup>3</sup> Gelombang serangan pasukan Jepang dimulai pada tanggal 10 Januari 1942 di Tarakan,

kemudian serangan menyebar ke Balikpapan, Pontianak, Martapura, dan Banjarmasin. Militer Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1942, di tiga tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan Kragan (Jawa Tengah).<sup>4</sup> Pada tanggal 5 Maret 1942 kekuatan pasukan Jepang mulai menduduki daerah pedalaman Jawa termasuk Surakarta.<sup>5</sup>

Kekuatan pasukan Jepang yang menyerang dan menduduki Surakarta dipimpin oleh komandan Funabiki. Kehadiran pasukan ini dihadang oleh dua kompi pasukan KNIL, satu peleton kavaleri, dua batalyon Legiun Mangkunegaran, satu batalyon *Reserve Corps*, dan ditambah dengan beberapa pasukan milisi. Pasukan "penghadang" ini tidak mampu menghambat gerak maju pasukan Jepang sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama militer Jepang berhasil menguasai kota Surakarta.<sup>6</sup> Pasukan Jepang segera melakukan penangkapan-

\* Staf Pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

penangkapan terhadap orang-orang Belanda. Rumah orang-orang Belanda yang ditinggalkan akibat penangkapan atau bersembunyi menjadi sasaran penjarahan masyarakat. Seluruh isi rumah dengan sangat cepat menjadi habis diangkut oleh masyarakat yang selama ini tidak pernah membayangkan memiliki peralatan sebagaimana yang dimiliki orang-orang Belanda.<sup>7</sup>

Kemenangan Jepang atas Belanda di Surakarta terjadi pula di daerah-daerah lain di pulau Jawa dan seluruh Indonesia. Keadaan ini memaksa Gubernur Jendral Hindia Belanda Tjarda van Starckenborgh Stachouwer menyerah tanpa syarat terhadap militer Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jendral Hitoshi Imamura dalam sebuah pertemuan di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942.<sup>8</sup> Pertemuan ini mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda dan menempatkan Jepang sebagai penguasa baru atas Indonesia. Hak-hak kekuasaan ini memungkinkan Jepang membagi wilayah Indonesia dalam tiga komando, yaitu: Tentara Keenam-belas di Pulau Jawa dan Madura yang berpusat di Batavia, Tentara Keduapuluhlima di Sumatra dengan pusatnya Bukittinggi, dan Armada Selatan Kedua di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Barat yang berpusat di Makasar.<sup>9</sup>

Pendudukan Jepang atas Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis dalam upayanya menghadapi sekutu dalam perang pasifik. Strategi pendudukan Jepang didasarkan seluruh kebijakannya pada kepentingan untuk kemenangan perang "Asia Timur Raya".<sup>10</sup> Kebijaksanaan tersebut dijalankan dengan tiga prinsip, yaitu mencari dukungan masyarakat, memanfaatkan struktur pemerintahan yang telah ada, dan mengusahakan agar daerah yang diduduki dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>11</sup>

Pemerintah militer Jepang menggunakan berbagai macam cara agar mendapat simpati rakyat Indonesia.<sup>12</sup> *Sendenbu* merupakan alat propaganda Jepang untuk mempengaruhi dan mendekati, tidak saja masyarakat bawah, tetapi juga tokoh-tokoh politik maupun penguasa-penguasa lokal. Upaya untuk mendapatkan dukungan dari penguasa lokal seperti Surakarta dan Yogya-

karta dilakukan dengan mengukuhkan status istimewa mereka dengan nama Surakarta *Kochi* dan Yogyakarta *Kochi*.<sup>13</sup> Penguasa daerah *Kochi* tersebut mendapat sebutan *Koo*, yaitu Surakarta *Koo*, Mangkunegoro *Koo*, Yogyakarta *Koo*, maupun Paku Alam *Koo*.<sup>14</sup>

Kedudukan Surakarta yang dijadikan sebagai suatu daerah istimewa (*kochi*) oleh Jepang dimaksudkan agar kedua penguasa kota ini mau bekerja sama dengan pemerintah yang baru. Keinginan Jepang ini diperlihatkan pula pada kunjungan-kunjungan yang dilakukan pejabat-pejabat tinggi Jepang, seperti Kolonel Nakayama maupun T. Kohri ke Surakarta.<sup>15</sup> Kunjungan-kunjungan tersebut bermuara pada suatu keinginan agar kedua penguasa kraton di Surakarta bersedia membantu Jepang dalam mencapai cita-cita memenangkan perang Asia Timur Raya.<sup>16</sup>

Berbagai pendekatan yang dilakukan Jepang terhadap kedua raja Surakarta ini merupakan bagian dari strategi Jepang memanfaatkan kedua penguasa tersebut dalam mengeksploitasi secara lebih intensif sumber daya alam dan manusia yang terdapat di daerah ini. Para tokoh masyarakat maupun kepala-kepala desa digunakan pula untuk menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan Jepang dalam mensukseskan Perang Asia Timur Raya. Untuk menyediakan keperluan perang, dilakukan pemaksaan pada penyerahan padi, penyerahan galek, penanaman biji jarak, biji kapas, dan rosela, serta mempekerjakan rakyat secara paksa sebagai *romusha*. Kondisi semacam ini memperlebar jurang perbedaan tajam antara rakyat dengan pemimpinnya yang menimbulkan rasa dendam yang meledak pada revolusi Agustus 1945.

## PENGUMPULAN PADI

Tujuan pemerintah militer Jepang menduduki dan menguasai Indonesia adalah untuk mendapatkan bahan baku guna memenuhi kebutuhan perang. Sasaran utama dari eksploitasi di Indonesia adalah hasil-hasil pertanian dan tenaga kerja. Pedesaan Jawa dengan tanahnya yang

subur dan penduduknya yang banyak, dianggap mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa. Oleh karena itu, Jepang berusaha mengeksploitasinya dengan seefisien mungkin melalui kontrol secara intensif atas pulau ini. Untuk memenuhi kepentingannya, pemerintah militer Jepang melakukan penekanan dan kekerasan. Tindakan ini juga diikuti dengan sanksi dan hukuman bagi orang yang berani melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>17</sup>

Jawa sebagai daerah penghasil padi terbesar di wilayah Indonesia ditetapkan sebagai wilayah pemasok padi untuk pulau-pulau di luar Jawa serta medan pertempuran di Pasifik Selatan.<sup>18</sup> Pemerintah militer Jepang yang terdiri dari para pejabat tinggi, anggota serdadu, dan orang-orang sipil berkebangsaan Jepang sangat membutuhkan padi sebagai konsumsi makan selama mereka menduduki Indonesia. Selain itu, kebutuhan padi dipergunakan juga untuk kelompok-kelompok pendukung perang yang dianggap penting (semi militer), seperti PETA (Pembela Tanah Air), Heiho (Pasukan bantuan), Romusha, Pangrehpraja, kerja bakti (konrohoshi), dan "tenaga ahli".<sup>19</sup> Untuk memenuhi kebutuhan ini, tiap tahunnya pemerintah militer Jepang memerlukan kira-kira 1 sampai dengan 2 juta ton padi atau 38 persen dari seluruh produksi padi di Jawa.<sup>20</sup>

Kebutuhan yang begitu besar terhadap tersedianya bahan pangan, terutama padi, mengharuskan pemerintah Jepang mengeksploitasi secara intensif produksi padi dari petani. Eksploitasi tersebut berupa kebijaksanaan yang mengharuskan petani atau setiap orang yang menghasilkan padi atau bahan pangan lainnya untuk menyerahkan hasil produksinya tersebut kepada pemerintah militer Jepang. Kebijaksanaan ini baru dimulai pada bulan Agustus 1942 atas inisiatif Gunseikanbu. Sejak dimulainya rencana pengumpulan padi sampai April 1943, rencana pengumpulan belum berjalan secara efektif karena terjadi banyak perbaikan-perbaikan kebijaksanaan dan munculnya peraturan-peraturan baru mengenai padi. Baru pada bulan April 1943 sampai berakhirnya pemerintahan Jepang merupakan masa intensif pengumpulan padi dari petani.<sup>21</sup>

Beberapa peraturan yang muncul untuk mendukung kebijakan penyerahan padi adalah penetapan kuota padi, penetapan harga gabah dan beras, dan dibentuknya Badan Pengelolaan Pangan atau Shokuryo Kanri Zimusyō yang kemudian berubah menjadi Zyuuyō Bussī Kodan.<sup>22</sup> Badan yang mengurus penyerahan padi di Surakarta tidak hanya dikelola oleh Zyuuyō Bussī Kodan, tetapi diawasi pula oleh Kooti Soomutyōokan. Kedua badan tersebut menentukan besarnya kuota padi yang harus dijual atau diserahkan dan kuota untuk padi yang harus disimpan untuk dimakan atau untuk bibit. Penetapan kuota kepemilikan padi atau persediaan makanan bagi setiap petani di Surakarta maksimal sebesar 100 kg selama 1 tahun bagi petani yang panen sekali setahun. Petani yang panen 2 kali setahun diperbolehkan menyimpan cadangan beras atau padi sebanyak-banyaknya 50 kg selama setengah tahun. Besarnya persediaan bibit padi ditetapkan sebanyak-banyaknya 75 kg/ha dan bibit gabah sebesar 50 kg/ha. Produksi padi petani yang sudah dikurangi untuk bibit dan makan selama setahun harus diserahkan atau dijual kepada pemerintah.<sup>23</sup> Petani yang tidak mematuhi peraturan ini dapat dihukum paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 100 rupiah.<sup>24</sup>

Zyuuyō Bussī Kodan dan Kooti Soomutyōokan dalam mengurus proses penyerahan padi memanfaatkan pejabat-pejabat lokal seperti Kencho (bupati), Guncho, Soncho (camat), dan Kucho (kepala desa). Mereka harus mengusahakan pengumpulan padi yang diserahkan petani ke dalam lumbung-lumbung padi dan kemudian diangkut ke gudang pengumpulan padi milik kerajaan yang disebut Petuton.<sup>25</sup> Seringkali, para pejabat lokal, terutama Kucho, memaksa para petani agar segera mengumpulkan padi untuk mengejar target penerimaan padi yang telah ditentukan oleh Kooti Sumotyōkan. Bahkan tidak jarang terjadi, produksi padi yang dihasilkan oleh setiap petani dipaksa untuk diserahkan semuanya tanpa mengindahkan kuota yang telah ditetapkan untuk bibit dan makan petani selama setahun. Target pengumpulan padi yang

telah ditentukan kira-kira berkisar 30 ribu hingga 50 ribu ton dalam setiap periode pengumpulan. Tabel 1 akan memperlihatkan variasi jumlah permintaan dan penyerahan padi di Surakarta.<sup>26</sup>

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa proses pengumpulan padi berjalan semakin

dari nilai sebenarnya. Tabel 2 memperlihatkan harga paling tinggi untuk bahan pangan berupa padi, padi ketan, beras, menir (padi pecah), dan dedak di Surakarta hingga berakhirnya masa pendudukan Jepang.<sup>29</sup>

Proses pengumpulan padi yang bersifat memaksa dan penuh dengan kecurangan

Tabel 1. Permintaan dan Penyerahan Padi di Surakarta 1943-1945

Periode Pengumpulan	Target (Ton)	Persentase Hasil Panen	Penyerahan (Ton)	Rata-Rata Penyerahan
1. April 1943-Maret 1944	30.521	7,0	16.141	52,9
2. April 1944- Maret 1945	44.800	10,3	46.538	103,9
3. April 1945- September 1945	49.000	24,6	37.073	75,7

Sumber: Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol* ....., hlm. 83-85

intensif. Prosentase pengumpulan padi dengan hasil panen tiap tahunnya yang terus meningkat tersebut dapat diartikan dengan semakin diabaikannya hak-hak petani dalam memiliki padi. Prosentase tersebut memperlihatkan bahwa semakin berkurangnya padi yang disimpan penduduk dan semakin banyak padi yang harus diserahkan kepada pemerintah. Upaya-upaya yang intensif ini terlihat pada seruan-seruan pemerintah Jepang lewat berbagai macam cara terhadap penduduk Surakarta. Seruan-seruan tersebut didukung sepenuhnya oleh kedua penguasa Surakarta yang ikut berperan aktif dalam mensukseskan pengumpulan padi dari petani.<sup>27</sup>

Padi yang diserahkan oleh petani kepada Zyuyoo Bussi Kodan dan Kooti Soomutyookan lewat para pejabat lokal tersebut dibayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Harga padi ditentukan dengan nilai uang yang sangat rendah dan dibayar dengan uang kertas yang seandainya sendiri dicetak oleh pemerintah Jepang.<sup>28</sup> Belum lagi upaya-upaya pencatutan atau korupsi yang dilakukan oleh para pejabat lokal sebelum uang tersebut diserahkan kepada para petani. Oleh karena itu, petani menerima sejumlah uang yang lebih kecil

telah menyebabkan kesengsaraan dan kekurangan padi di beberapa daerah di Surakarta. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Surakarta mulai mengkonsumsi palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, dan singkong kering (gaplek). Akan tetapi, upaya mengkonsumsi palawija ini dilakukan dengan jumlah yang sangat terbatas karena petani diwajibkan pula menyerahkan sebagian hasil produksinya kepada pemerintah. Hasil produksi palawija tersebut digunakan oleh Jepang untuk menutupi kekurangan kebutuhan terhadap beras dan dipakai untuk konsumsi para romusha.<sup>30</sup> Palawija yang telah terkumpul dihargai dengan nilai uang yang lebih rendah dibandingkan harga padi. Tiap-tiap daerah di Jawa menetapkan palawija dengan harga yang berbeda-beda. Tabel 3 memperlihatkan harga palawija di Surakarta.<sup>31</sup>

Kebijakan penyerahan padi dan palawija telah menyulitkan masyarakat Surakarta untuk memenuhi kebutuhan makan tiap harinya. Implikasi dari kebijaksanaan ini adalah kekurangan pangan yang dialami oleh sebagian besar penduduk Surakarta. Kondisi kekurangan pangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kebijakan penyerahan bahan makanan, tetapi disebabkan pula

Tabel 2. Penjualan Paling Tinggi untuk Padi, Padi Ketan, Beras, Menir, dan Dedak di Surakarta Masa Pendudukan Jepang

No	Bahan Makanan Pokok (per 100 Kg)		Harga (Rupiah)
	Jenis Pangan	Macam	
1	Padi	Bulu	7
		Cere	6,60
		Gabah	8
2	Padi Ketan	Bulu	7,50
		Cere	7
		Gabah	8,50
3	Beras	Beras	11,65
		Beras Ketan	12,65
4	Menir/Beras Pecah	Nomor 1	8,85
		Nomor 2	5,15
5	Dedak	Nomor 1	2,80
		Nomor 2	1,80

Sumber: Berita Pemerintah *Kan Po*, no. 60, Pebruari 2605

Tabel 3. Harga Penjualan Palawija di Surakarta Tahun 1944

No	Macam Palawija (Per 100 Kg.)	Harga (dalam rupiah) di Tiap-Tiap:			
		Penghasil	Pengumpul (agen)	Partai Besar	Pengecer
1	Kedelai	4,90	5,70	6,60	7,70
2	Jagung	3,70	4,50	5,40	6,70
3	Kacang tanah	5,10	6	7	8
4	Kacang Ose	-	10	11	12,50
5	Kacang Otok	10	11	11,90	12,90
6	Kacang Ijo	12	13	13,90	15,30
7	Kratok	4,70	5,50	6,40	7,40
8	Gaplek	1,40	2	2,80	3,80

Sumber: *Kan Po*, no. 48, Agustus 2604

menurunnya hampir semua produksi bahan makanan di seluruh Jawa dan Madura. Penurunan bahan makanan di seluruh Jawa dan Madura ini dapat memperlihatkan pula penurunan produksi bahan makanan di Surakarta. Dalam tabel 4 ditunjukkan produksi bahan makanan di Jawa dan Madura yang semakin menurun.

Produksi bahan makanan yang semakin menurun itu, sebenarnya, sangat mengherankan di saat pemerintah Jepang secara intensif mengontrol pengelolaan bahan

makanan di Jawa. Beberapa laporan menyebutkan bahwa menurunnya produksi bahan makanan pokok disebabkan oleh iklim, kelangkaan sapi, hama tikus, dll.<sup>32</sup> Menurunnya produksi bahan makanan pokok dan program penyerahan padi dan palawija yang semakin intensif menyebabkan meningkatnya angka kematian yang dialami hampir seluruh wilayah di Indonesia.<sup>33</sup> Angka kematian di Surakarta pada tahun 1939 sebesar 52 ribu jiwa, tahun 1943 sebesar 62 ribu jiwa, dan tahun 1944 meningkat dua

Tabel 4. Bahan Makanan Pokok di Jawa dan Madura Selama Pendudukan Jepang (dalam 1.000 ton)

Macam Makanan	1937-1941	1942	1943	1944	1945	Perubahan
Padi	8.511	8.302	8.122	6.811	5.600	-33 %
Jagung	2.056	2.165	1.603	1.211	900	-55 %
Singkong	8.249	8.735	7.521	5.558	3.100	-62 %
Kedelai	301	352	273	110	60	-80 %
Ubi	1.309	1.312	1.083	1.498	1.400	+7 %
Kacang	194	206	210	109	60	-69 %
Kentang	41	28	19	12	-	-

Sumber: Aiko Kurasawa, Mobilisasi dan Kontrol...hlm. 22-23.

kali lipat, yaitu 115 ribu jiwa.<sup>34</sup> Kematian yang tinggi pada tahun 1944 di Surakarta disebabkan karena tahun tersebut merupakan puncak kekurangan pangan akibat dari kekeringan. Daerah di Surakarta yang mengalami kekurangan pangan paling buruk dan jumlah kematian yang paling besar adalah Wonogiri.<sup>35</sup>

Wonogiri terletak di sebelah selatan kota Surakarta yang sebagian besar kondisi geografisnya berupa gunung kapur. Kondisi yang demikian ini sangat menyulitkan petani menanam berbagai macam tanaman pangan kecuali singkong. Apabila singkong dikeringkan dapat menjadi gaplek yang merupakan bahan dasar makanan utama masyarakat Wonogiri.<sup>36</sup> Produksi gaplek dari masyarakat Wonogiri yang sebenarnya hanya cukup untuk konsumsi masyarakat Wonogiri sendiri, diwajibkan oleh pemerintah Jepang untuk disetorkan. Badan yang mengurus pengumpulan gaplek dari Wonogiri dan beberapa daerah lainnya, seperti Boyolali dan Klaten, dilakukan oleh Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha.<sup>37</sup>

#### PENGUMPULAN GAPLEK

Seiring dengan semakin menurunnya produksi bahan makanan, terutama padi, gaplek dianggap sebagai alternatif terbaik untuk menutupi kekurangan tersebut. Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha dan Mangkunegaran Kooti Soomutyokan memperkirakan panen gaplek di Wonogiri Ken pada tahun 1944 sebesar 100 ribu ton di atas tanah

seluas 50 ribu hektar. Dari produksi gaplek sebanyak itu, penduduk Wonogiri berhak mendapat 76.750 ton untuk makan selama setahun, 13.250 ton untuk disimpan sebagai cadangan masa paceklik, dan 10.000 ton diserahkan kepada pemerintah.<sup>38</sup>

Kondisi yang terjadi di Wonogiri pada tahun 1944 telah menjungkirbalikkan perkiraan yang telah dibuat. Sepanjang tahun 1944, Wonogiri jarang diguyur hujan sehingga mengalami kekeringan yang parah. Kondisi yang demikian ini menyebabkan produksi gaplek turun hingga 50 persen.<sup>39</sup> Produksi gaplek yang sebenarnya kurang untuk memenuhi kebutuhan penduduk, tetap diwajibkan untuk disetorkan kepada Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha. Gaplek yang berhasil dikumpulkan dengan paksa oleh para pejabat lokal dari masing-masing Ku di Wonogiri sebanyak kurang lebih 800 ribu kg.<sup>40</sup> Pada tabel 5 ditunjukkan daftar gaplek yang telah terkumpul di masing-masing Ku di Wonogiri Ken.

Jumlah gaplek yang terkumpul sebanyak 829.816 kg ini telah dipesan oleh Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha cabang Semarang sebanyak 400 ribu kg.<sup>41</sup> Sisa gaplek sebanyak 449.225 kg disimpan di beberapa gudang di masing-masing Ku di Wonogiri Ken.<sup>42</sup>

Bencana kekeringan dan pengumpulan gaplek secara paksa telah menyebabkan terjadinya kekurangan pangan di Wonogiri. Kondisi ini mencapai puncaknya pada bulan September dan Oktober 1944. Penduduk Wonogiri terpaksa memakan "sesuatu" yang

Tabel 5. Daftar Gapek yang Terkumpul di Masing-masing Ku di Wonogiri Ken Tahun 1944

Gun	Son	Banyaknya Pengumpulan (Kg)	Jumlah (Kg)
Wonogiri	Wonogiri	69.474	220.811
	Selogiri	16.374	
	Ngadirojo	89.309	
	Nguntoronadi	45.654	
Wuryantoro	Wuryantoro	41.265	231.240
	Manyaran	27.486	
	Eromoko	80.272	
	Pracimantoro	82.267	
Baturetno	Baturetno	26.612	139.723
	Batuwarno	21.418	
	Tirtomoyo	7.697	
	Giriwoyo	27.510	
	Giritontro	56.622	
Jatisrono	Jatisrono	54.053	214.638
	Jatiroto	22.259	
	Jatipuro	39.277	
	Girimarto	62.560	
	Sidoharjo	36.489	
Purwantoro	Purwantoro	9.088	23.404
	Slogohimo	1.067	
	Bulukerto	7.924	
	Kismantoro	5.325	
Jumlah			829.816

Sumber: "Bendel Pengoempoelan Gapek dan Katjang 1944-1945", Arsip Rekso Pustoko, no. S.1366

tidak layak untuk dimakan seperti bonggol pisang dan bonggol sente yang gatal.<sup>43</sup> Walaupun kondisi semacam ini diderita pula oleh penduduk daerah lain seperti Boyolali, Klaten, dll., tetapi Wonogiri mengalami nasib yang lebih parah. Penyakit busung lapar dan angka kematian meningkat dengan pesat terutama daerah Slogohimo, Purwantoro, dan Jatipurwo.<sup>44</sup> Sementara itu, penduduk tidak mampu membeli bahan makanan terutama gapek karena harganya telah meningkat dari 2 rupiah menjadi 20 rupiah per kwintal.<sup>45</sup> Untuk mengatasi hal ini, Wonogiri Kencho mengusulkan kepada Kooti Soomutyookan agar bersedia membagi-bagikan gapek yang telah disimpan di gudang sebanyak 449.225 Kg.<sup>46</sup> Walaupun usul tersebut diterima, tetapi tidak banyak

membantu mengurangi penderitaan penduduk yang sudah sangat parah. Bahkan kondisi semacam ini telah menyebabkan rakyat menjadi guncang dan tidak percaya lagi kepada Kucho, Soncho dan Guncho. Ketidakpercayaan ini dikhawatirkan dapat memicu huru-hara di dalam masyarakat.<sup>47</sup>

#### PENANAMAN WAJIB

Kebijaksanaan penyerahan wajib untuk padi dan bahan makanan pokok lainnya merupakan beban yang sangat berat yang harus dipikul oleh penduduk Indonesia. Beban tersebut diperparah dengan kebijaksanaan menanam tanaman yang bisa menghasilkan bahan untuk mendukung

perang. Beberapa tanaman perkebunan seperti karet, gula dan kina dipertahankan keberadaannya walaupun produksinya terus merosot.<sup>48</sup> Ketiga tanaman tersebut dianggap dapat membantu kelancaran perang, seperti misalnya kina yang merupakan bahan yang penting untuk obat-obatan. Tanaman perkebunan lainnya yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda seperti kopi, teh dan tembakau kurang mendapat perhatian, karena diklasifikasikan sebagai barang kenikmatan yang tidak berguna untuk perang. Oleh karena itu, di beberapa daerah, tanaman kopi, teh, dan tembakau diganti dengan tanaman istimewa yang berguna untuk perang, yaitu tanaman jarak,<sup>49</sup> kapas, dan rami (rosela) yang berguna untuk pakaian.<sup>50</sup>

Selama pemerintah Hindia Belanda, tanaman jarak bukan merupakan tanaman yang diprioritaskan. Jarak hanya tumbuh terbatas di daerah Surakarta dan Bojonegoro dengan produksi tiap tahunnya berkisar 10.000 ton.<sup>51</sup> Setelah kedatangan Jepang, tanaman jarak merupakan primadona yang harus ditanam oleh penduduk Indonesia. Tanaman ini mengandung biji yang bisa menghasilkan minyak yang berguna untuk bahan bakar pesawat terbang, menghaluskan kulit, obat sabun dan untuk membersihkan perut.<sup>52</sup> Setiap 7.500 biji jarak bisa menghasilkan minyak yang dapat dipakai untuk menerbangkan pesawat terbang selama 1 jam. Apabila rata-rata 1 pohon jarak menghasilkan 500 biji, maka 15 pohon jarak

sudah cukup untuk menerbangkan pesawat Jepang selama 1 jam.<sup>53</sup>

Tanaman jarak (*Ricinus Communis*) dapat tumbuh subur di tanah sarang (berpasir) yang kering dan berhawa panas dengan umur rata-rata 4 bulan.<sup>54</sup> Daerah di Surakarta yang sangat cocok dan merupakan sasaran utama penanaman jarak adalah Wonogiri yang bertanah kering dan sebagian daerah Boyolali, Klaten dan Sukoharjo.<sup>55</sup> Pada tahun 1942 dan 1943 Wonogiri menyediakan tanah yang paling luas untuk penanaman jarak yaitu 5656 hektar dari 20 ribu hektar di seluruh Surakarta.<sup>56</sup> Tabel 6 berikut ini menampilkan perincian jumlah tanah yang disediakan untuk tanaman jarak di Wonogiri tahun 1943.<sup>57</sup>

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan akan minyak jarak Senda Shokai sebagai badan yang bertanggung jawab mengenai tanaman jarak mengeluarkan selebaran-selebaran dan pamflet-pamflet yang berisi anjuran untuk menanam jarak.<sup>58</sup> Shenda Shokai kemudian membentuk "jarak shiidoi" yang memberi penyuluhan dan bimbingan langsung kepada petani. Program ini sedikit mengalami hambatan karena sebagian besar tanah produktif di Surakarta sudah ditanami berbagai macam tanaman pokok yang wajib diserahkan kepada Jepang. Untuk mengatasi masalah ini, jarak dianjurkan untuk ditanam di berbagai tempat yang memungkinkan untuk ditanam seperti pinggir-pinggir jalan maupun halaman-halaman sekolah.<sup>59</sup> Bahkan, jarak ditanam pula di tanah-tanah pekuburan milik Tiong

Tabel 6. Luas Tanah yang ditanami Jarak Di Wonogiri Tahun 1943

GUN	Luas Tanah yang Ditanami (dalam Hektar)		
	Tegalan	Sawah	Jumlah
1. Wonogiri	345	473	1018
2. Wuryantoro	1491	469	1960
3. Baturetno	1367	474	1841
4. Jatirono	159	242	401
5. Purwantoro	65	280	345
Jumlah			5656

Sumber: "Bendel Tanaman Jarak 1943-1945", Arsip Rekso Pustoko, S.105

hoa.<sup>60</sup> Cara-cara tersebut dimaksudkan agar penerimaan biji jarak dapat memenuhi kuota yang telah ditetapkan. Seringkali anjuran penanaman jarak disertai dengan ancaman agar dapat mencapai kuota. Apabila kuota tersebut tidak terpenuhi, para Kucho maupun pejabat yang mengurusinya mendapat tekanan dari Jepang.<sup>61</sup>

Penduduk Surakarta yang sudah bersedia menanam jarak atau menyerahkan biji jarak kepada Shenda Shokai tidak dihargai dengan sejumlah uang, tetapi ditukar dengan beberapa liter minyak tanah.<sup>62</sup> Setiap 1 kg biji jarak yang diserahkan mendapat imbalan 0,3 liter minyak tanah dengan harga 1 liter 12,5 sen. Apabila agen tempat penyerahan biji jarak yang sudah ditunjuk Shenda Shokai tidak memiliki cadangan minyak tanah penduduk yang menyerahkan jarak mendapatkan kupon. Kupon tersebut dapat ditukarkan dengan minyak tanah di tempat pompa minyak yang telah ditentukan.<sup>63</sup>

Pemerintah Jepang menggunakan minyak tanah sebagai alat penukaran biji jarak dimaksudkan agar penduduk tidak memakai biji jarak sebagai alat penerangan rumah. Sudah sejak lama penduduk Surakarta memanfaatkan biji jarak sebagai alat penerangan dengan cara digerus lalu dinyalakan.<sup>64</sup> Dengan dibagikannya minyak tanah, diharapkan penduduk menggunakan minyak tanah sebagai bahan penerangan rumah menggantikan biji jarak. Akan tetapi, minyak tanah yang disediakan pemerintah tidak dapat mencukupi kebutuhan penduduk Surakarta.<sup>65</sup> Pada tahun 1942, minyak tanah yang dibagikan kepada penduduk hanya 250 blek (kaleng minyak),<sup>66</sup> padahal berdasarkan laporan dari kerajaan, kebutuhan minyak tanah untuk seluruh penduduk Surakarta kurang lebih 900 blek dengan rincian Kasunanan membutuhkan 600 blek dan Mangkunegaran 300 blek.<sup>67</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan penanaman jarak dengan pembagian minyak tanah sebagai imbalannya mengandung banyak kecurangan yang merugikan penduduk.

Pengelolaan penanaman kapas dan serat rami tidak terlepas pula dari kecurangan dan tekanan-tekanan. Penanaman kapas di Surakarta kurang begitu digalakkan

dibandingkan penanaman jarak. Tanaman kapas dapat tumbuh dengan subur di daerah yang memiliki curah hujan yang cukup yaitu kira-kira 1,500 mm sampai 3 mm. Tanaman tersebut ditanam pada musim penghujan dan dipanen pada saat kemarau. Walaupun penanaman kapas yang baik adalah bulan Februari, tetapi penanaman tersebut baru dapat dilaksanakan pada bulan April untuk menunggu padi usai dituai.<sup>68</sup>

Badan Jepang yang mengurus penanaman kapas adalah Menka Saiba Kyokai. Pengumpulan biji kapas di Surakarta tidak saja diawasi oleh Menka Saiba Kyokai tetapi dikelola pula oleh perusahaan Jepang bernama Tozan Noji. Keterlibatan Tozan Noji ini dihubungkan dengan distribusi bahan sandang kepada penduduk.<sup>69</sup> Sebagai perusahaan yang berorientasi profit, distribusi bahan pakaian kepada penduduk diupayakan untuk tidak merugikan perusahaan. Oleh karena itu, bahan pakaian yang dibagikan tidak mencukupi jumlah kebutuhan penduduk. Selain itu, panitia yang terlibat langsung dalam pembagian bahan pakaian ini seperti wedana, kepala desa dengan perangkatnya melakukan banyak kecurangan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa banyak kepala desa dengan perangkat-perangkatnya melakukan berbagai penyimpangan dalam pembagian bahan pakaian seperti upaya penimbunan dan menjual bahan tersebut ke pasar gelap.<sup>70</sup>

Pembagian pakaian yang penuh dengan kecurangan tersebut menyebabkan banyak penduduk Surakarta tidak menerima jatah pakaian yang seharusnya diterima. Kondisi ini diperparah dengan langkanya kain dan pakaian di pasaran karena dikirim untuk kebutuhan perang dan adanya pengetatan perdagangan. Penduduk Surakarta yang ingin membeli pakaian terlebih dulu harus mendaftar dan diberi semacam kupon.<sup>71</sup> Kupon tersebut dapat ditukarkan dengan kain atau pakaian apabila persediaan sudah ada.<sup>72</sup> Akan tetapi, seringkali kupon tersebut tidak berguna karena persediaan kain atau pakaian memang tidak ada. Kenyataan semacam ini menyebabkan sebagian besar penduduk Surakarta menggunakan apa saja untuk menutupi

tubuhnya. Karung goni yang biasanya digunakan untuk menyimpan beras atau bahan makanan lainnya diubah menjadi baju dan celana. Walaupun karung goni tersebut mengandung banyak kutu yang gatal tetapi tidak dipedulikan oleh penduduk.<sup>73</sup>

Kondisi yang memprihatinkan tersebut disikapi oleh pemerintah Jepang dengan berbagai anjuran yang mengharapkan penduduk Surakarta yang mampu untuk mendermakan pakaiannya yang sudah tua (gombal). Pemerintah menetapkan pula peraturan yang mengharuskan pemilik kain batik untuk mendaftarkan barang miliknya agar tidak menjual, membeli atau memindahkannya. Penduduk yang melanggar peraturan ini akan dihukum selama-lamanya 1 bulan dan didenda sebanyak-banyaknya 100 rupiah. Perintah pendaftaran terhadap suatu barang diberlakukan pula untuk kepemilikan karung goni. Penduduk Surakarta yang memiliki lebih dari 10 buah karung goni agar mendaftarkan barangnya kepada pemerintah.<sup>74</sup> Kebijakan ini dikeluarkan karena karung goni telah berubah fungsinya sebagai bahan untuk pakaian, sehingga mengurangi jumlah karung goni yang digunakan untuk membungkus beras atau bahan makanan lainnya. Pada waktu yang bersamaan, pabrik karung goni yang berada di Delanggu tidak berproduksi dengan lancar karena banyak komponen pabrik yang rusak akibat dihancurkan oleh Belanda sebelum Jepang masuk ke Surakarta. Oleh karena itu, produksi karung goni yang dihasilkan oleh pabrik di Delanggu tidak mampu mencukupi kebutuhan yang diinginkan, padahal penanaman rami (rosela) sebagai bahan baku karung goni di Klaten telah digalakkan di areal tanah yang dulunya ditanami tembakau.<sup>75</sup> Upaya tersebut tetap saja tidak berhasil menutupi kekurangan kebutuhan masyarakat terhadap karung goni. Karung goni semakin lama semakin habis dan menjadi langka di tengah masyarakat. Kondisi yang demikian ini menyebabkan banyak penduduk yang tidak memiliki kain dan karung goni terpaksa telanjang atau menggunakan bahan lain untuk dijadikan pakaian seperti kertas merang atau serabut pohon.<sup>76</sup>

## SIMPULAN

Keberadaan pemerintah militer Jepang di Indonesia adalah mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Kebijakan Jepang tersebut dilakukan dengan sangat eksploitatif sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Daerah Surakarta yang merupakan salah satu penghasil sumber daya alam yang penting di Indonesia tidak luput dari kebijakan Jepang tersebut. Terlebih lagi sebagai kawasan yang subur daerah Surakarta dieksploitasi secara lebih intensif dan didukung oleh dua raja Surakarta yang berkuasa. Kedua kraton di Surakarta yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran beserta birokrat-birokrat di bawahnya sampai kepala desa merupakan komponen yang paling pokok dalam mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi masyarakat Surakarta.

Kebijakan Jepang di Surakarta dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber bahan makanan pokok dan penanaman paksa terhadap tanaman yang menguntungkan untuk perang. Sumber bahan makanan yang wajib dikumpulkan adalah padi, gapek, jagung, kacang, dan lain-lain. Penanaman paksa yang diperintahkan oleh Jepang adalah tanaman jarak, kapas, dan rosela.

Pengumpulan padi diorganisasikan oleh dua badan bentukan Jepang yaitu *Zyuuyoo Bussi Kodan* dan *Kooti Soomutyookan*. Kedua badan tersebut yang menentukan kuota banyaknya padi yang harus diserahkan dan menentukan besarnya uang yang harus diterima oleh petani. Akan tetapi, nilai padi dihargai sangat rendah dan itu pun seringkali dikorupsi oleh pejabat-pejabat lokal yang mengusahakan pengumpulan padi tersebut. Selain padi, bahan makanan pokok yang wajib diserahkan adalah gapek. Badan bentukan Jepang yang mengurus masalah gapek ini adalah *Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha*. Pengumpulan gapek banyak dilakukan di daerah Wonogiri karena gapek merupakan bahan makanan pokok daerah ini.

Pengumpulan padi dan gaplek yang sangat eksploitatif menyebabkan masyarakat Surakarta mengalami kekurangan pangan. Daerah di Surakarta yang mengalami kekurangan pangan yang paling parah adalah Wonogiri. Puncak dari paceklik pangan di Wonogiri terjadi pada tahun 1944-1945 karena pada tahun itu terjadi pula kekeringan. Akibat kekurangan pangan tersebut, masyarakat Wonogiri dan sebagian masyarakat Surakarta lainnya mengkonsumsi makanan yang tidak layak dimakan, yaitu bonggol pisang dan bonggol *sente*.

Penderitaan masyarakat Surakarta tidak hanya berhenti pada masalah pangan, tetapi juga karena diharuskan menanam tanaman yang menguntungkan Jepang. Tanaman yang diwajibkan untuk ditanam adalah jarak dan kapas. Jarak sangat berguna untuk bahan pelumas senapan dan bisa pula digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang. Adapun kapas dapat digunakan untuk bahan membuat pakaian. Imbalan untuk menanam jarak bukannya berupa uang tetapi berupa minyak tanah, sedangkan untuk kapas akan diberikan beberapa meter kain. Akan tetapi, janji pihak Jepang tersebut tidak pernah ditepati sehingga banyak masyarakat Surakarta yang tidak menggunakan pakaian. Mereka terpaksa menggunakan karung goni yang seharusnya sebagai tempat beras tetapi digunakan untuk pakaian. Oleh karena itu, banyak masyarakat Surakarta yang mengalami sakit kulit.

- 1 Anton Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 37.
- 2 Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (Dari Imporium sampai Imperium)*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hlm. 289-334.
- 3 Upaya menguasai wilayah Indonesia ini sebagai bagian dari strategi Jepang dalam "Perang Asia Timur Raya" atau Perang Pasifik yang dimulai dengan suatu penyerangan atas Pangkalan AL Pearl

Harbour di Hawaii. Lihat: Prof. Dr. Suhartono W. Pranoto, *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional* (Yogyakarta: Laper, 2001), hlm. 15-17.

- 4 Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 1-2; Lihat pula: O.D.P. Sihombing, *Pemuda Indonesia Menantang Fasisme Djepang* (Jakarta: Sinar Djaya, 1962), hlm. 62-68.
- 5 Menif, *Sejarah TNI Surakarta* (Surakarta, nt.), hlm. 3.; Lihat pula: Soebagijo, I.N., "Jepang Anggejawa: 45 Taun Kepungkur, Seminggu Perang ing Tanah Jawa", *Majalah Jaya Baya*, no. 29, 15 Maret 1987, hlm. 23.
- 6 Pasukan "penghadang" bentukan Belanda banyak yang tertangkap dan sebagian yang lainnya bersembunyi. Senjata api maupun senjata tajam dirampas oleh pasukan Jepang termasuk senjata-senjata yang berserakan di beberapa jalan yang menjadi pusat pertempuran seperti: jalan Tirtonadi, Balapan dan Gilingan. Lihat kesaksian dari: Mr. Soewidji, *Kisah Nyata Di Pinggir Jalan Slamet Riyadi di Surakarta* (Semarang: Percetakan Satya Wacana, nt.), hlm. 48.
- 7 Wawancara dengan Bp. Atmanto, 10 Januari 2000, pukul. 08.00 WIB. Lihat pula: Soewidji, *op. cit.*, hlm. 49-50.
- 8 Pertemuan di Kalijati tersebut menghasilkan perjanjian Kalijati yang merupakan penyerahan tanpa syarat dari pemerintah Kolonial Belanda terhadap tentara Jepang. Lihat: Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 1. (Bandung: Angkasa, 1988), hlm. 87-88.
- 9 George S. Kanahela, "The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence", Ph.D. Tesis, Cornell University, 1967, hlm. 65; Lihat pula: M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 297.
- 10 Dalam menjalankan pemerintahan di daerah pendudukan, Pemerintah Jepang telah merumuskan berbagai kebijaksanaan yang dihasilkan dari konferensi gabungan antara Departemen Luar Negeri dengan lembaga penelitian perang Jepang pada tanggal 19 Nopember 1942.

- Lihat: Williard H. Elsbree, *Japan's Role in Southeast Asia Nasionalist Movement's 1944-1945* (Massachusset: 1953), hlm. 15.
- 11 A.B. Lopian dan J.R. Chaniago, *Di Bawah Pendudukan Jepang: Kisah Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya* (Jakarta: ANRI, 1988), hlm. 2.
  - 12 Tindakan Jepang dalam mendapatkan simpati rakyat antara lain memperbolehkan dikibarkannya bendera Merah Putih, dikumandangkannya lagu Indonesia Raya, digunakannya bahasa Indonesia, diperkenalkannya Gerakan Tiga A, dll. Lihat: Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan UNS Press, 1995), hlm. 130-131.
  - 13 Pamudji, M.W., "Eling-Eling Jaman Jepang" *Majalah Penjebar Semangat*, no. 41, 7 Oktober 1989, hlm. 31; Lihat pula: Nugroho Notosusanto, *op. cit.* hlm 5.
  - 14 Wawancara dengan Bp. Sundoro M. Mituno Widyodipuro, 21 Mei 2001, pukul: 10.00 – 12.00 WIB; Lihat pula Soewidji, *op. cit.*, hlm. 52.
  - 15 Kunjungan pertama ke Kasunanan dan Mangkunegaran dilakukan oleh pejabat tinggi Jepang setingkat Gubernur di Semarang pada tanggal 14 dan 22 Maret 1942. Pada tanggal 31 Maret 1942, Kolonel Nakayama mengunjungi kedua kraton tersebut dengan menyampaikan pidato mengenai status Kraton Surakarta yang istimewa. T. Kohri berkunjung pada tanggal 4 April 1942 yang meminta kedua penguasa Surakarta membantu Jepang dalam mencapai cita-cita kemakmuran Asia Timur Raya. Lihat: Arsip berbahasa Belanda mengenai "Kejadian-Kejadian di Puro Mangkunegaran dalam Maret – April 1942", dalam *Arsip Mangkunegaran*, no. 1459.
  - 16 *Ibid.*
  - 17 Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 3
  - 18 *Ibid.*, hlm. 67-70.
  - 19 Lucas, *op. cit.*, hlm. 41.
  - 20 Berdasarkan laporan pejabat Belanda dalam "De Rijspositie van Nederlandsch-India" tahun 1937-1941, produksi padi seluruh Jawa rata-rata tiap tahunnya sebesar 8.511.000 ton. Lihat: Aiko Kurasawa, "Pendudukan Jepang dan Perubahan Sosial: Penyerahan Padi Secara Paksa dan Pemberontakan Petani di Indramayu" dalam Akira Nagayumi, ed., *Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Yayasan Obor, 1988), hlm. 86.; Berdasarkan laporan Miyamoto, produksi padi tersebut mengalami penurunan pada masa pendudukan Jepang hingga setengahnya yaitu kira-kira tiap tahunnya sebesar 4,2 ton. Lihat: Lucas, *op. cit.*, hlm. 42.
  - 21 Aiko Kurosawa dan Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 87.
  - 22 *Ibid.*, hlm. 87-88.
  - 23 *Kan Po* no. 41, April 2604, hlm. 12.
  - 24 "Bendel Pengoempolan Padi Oentoek Djepang", *Arsip Rekso Pustoko no. S. 1578 dan S. 1579*.
  - 25 "Tentang Petoeton", *Arsip Rekso Pustoko no. S. 1594*.
  - 26 Aiko Kurasawa (1993), *op. cit.* hlm. 83-85.
  - 27 "Dasar Peratoeran tentang Melakoekan Pemilikan Padi Oentoek Daerah Soerakarta Kochi dalam Tahoen Showa 20", *Arsip Rekso Pustoko, no. S.1321*.
  - 28 Colin Wild dan Peter Carey, *Gelora Api Revolusi* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 86
  - 29 *Kan Po*, no. 60, Pebruari 2605.
  - 30 Wawancara kepada Soekarman (84 th.), 1 Januari 2000, pukul. 16.00-18.00. WIB.
  - 31 Berita Pemerintah *Kan Po*, no. 48, Agustus 2604.
  - 32 Koesnadi (*Itto Keibuho Kootookakari Tyoo*) tgl 23. Oktober 2604 dalam "Bendel Rahasia Djepang 1943-1945", *Arsip Rekso Pustoko, no. 155*.
  - 33 William H. Frederick, *Pandangan dan Gejala, Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia: Surabaya 1926-1948* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 132.
  - 34 Aiko Kurasawa (1993), *op. cit.*, hlm. 105.
  - 35 Lihat laporan rahasia dalam "Bendel Rahasia Djepang, 1943-1945", *Arsip Rekso Pustoko, no. 155*.
  - 36 Gapek dapat dipergunakan untuk membuat berbagai macam makanan dan bahan makanan seperti gatot, tepung tapioka,

- tepung kanji, dll. Makanan yang populer dikonsumsi masyarakat Wonogiri yang terbuat dari gaplek adalah *tiwul*.
- 37 Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha semula bermarkas di jalan Gladak 1 Surakarta, kemudian pada tahun 1945 pindah ke jalan Loji Wetan 18 Surakarta. Lihat kop-kop surat yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha, dalam "Bendel Pengoempoelan Gaplek dan Katjang, 1944-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S. 1366.
- 38 Mangkunegaran Kooti Soomutyokan kepada Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha, tgl. 10 Gogatsu 2604 (10 Mei 1944) dalam "Bendel Pengoempoelan Gaplek dan Katjang 1944-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.1366.
- 39 Mangkunegaran Kooti Soomutyokan kepada Tuan Surakarta Kooti Zimu Kyoku Tyookan, 30 hachigatsu 2604 (30 Agustus 1944), dalam "Bendel Pengoempoelan Gaplek dan Katjang 1944-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no.S. 1366; Lihat pula: Koesnadi (*Itto Keibuho Kotookari Tyoo*) kepada Tuan Surakarta Keisatsu Butyo (*Chianka*), tgl. 16 Oktober 2604 dalam "Bendel Rahasia Djepang, 1943-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S. 155.
- 40 Jumlah gaplek yang dilaporkan dengan jumlah perinciannya mengalami perbedaan. Jumlah gaplek yang dilaporkan sebesar 849.255, sedangkan jumlah gaplek dalam perincian sebesar 829.816. Lihat: Margono Djojohadikoesoemo (pembesar Kabupaten) kepada Paduka Wonogiri Kencho, 11 Ju-gatsu 2604 (11 Oktober 1944), dalam "Bendel Pengoempoelan Gaplek dan Katjang, 1944-1945" *Arsip Rekso Pustoko*, no.S. 1366.
- 41 Wakil Pengurus Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha cabang Semarang kepada Toean Mangkoenegaran Seityo, 17 Juichigatsu 2604 (17 Nopember 1944), dalam "Bendel Pengoempoelan Gaplek dan Katjang, 1944-1945" *Arsip Rekso Pustoko*, no. S. 1366.
- 42 Margono Djojohadikoesoemo kepada Padoeka Soerakarta Kooti Zimu Kyoku Keisaibutyo, 12 Desember 2604, dalam "Bendel Pengoempoelan Gaplek dan Katjang 1944-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. 1366.
- 43 Laporan Rahasia: Koesnadi (*Itto Keibuho Kotookari Tyoo*) tgl 23. Oktober 2604 dalam "Bendel Rahasia Djepang 1943-1945" *Arsip Rekso Pustoko*, no. 155.
- 44 Wonogiri Kencho kepada Toean Kooti Soomutyokan 19 Juni-gatsu 2604 (19 Desember 1944) dalam "Bendel Pengoempoelan Gaplek dan Katjang 1944-1945, *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.1366.
- 45 Sarwoko Mangoenkoesoemo kepada Toean Soerakarta Kooti Zimu Kyoku Tyookan, 30 hajigatsu 2604 (30 Agustus 1944) dalam "Bendel Pengoempoelan Gaplek dan Katjang 1944-1945, *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.1366.
- 46 Wonogiri Kencho kepada Toean Kooti Soomutyokan 19 Juni-gatsu 2604 (19 Desember 1944) dalam "Bendel Pengoempoelan Gaplek dan Katjang 1944-1945, *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.1366.
- 47 Laporan rahasia: Koesnadi, 16 Oktober 2604, dalam "Bendel Rahasia Djepang 1943-1945, *Arsip Rekso Pustoko*, no. S. 155.
- 48 Aiko Kurasawa (1993), *op. cit.*, hlm. 37-53.
- 49 *Kan Po*, no. 32, Desember 2603, hlm. 32.
- 50 Aiko Kurasawa (1993), *op. cit.*, hlm. 28.
- 51 *Ibid.*, hlm. 36.
- 52 *Asia Raja*, no. 59, 27 Djoeni 2602.
- 53 "Mangga Kita Nanem Djarak, Wonten ing Kebon Oetawi Pekawisan: Kita Baktekaken Kagem Garoeda Angkasa", Selebaran Jepang yang dikeluarkan oleh *Sendenbu*, tahun 2602.
- 54 Seruan "Yasjima" dalam *Asia raja*, no. 59, 27 Djoeni 2602.
- 55 Wonogiri Kencho kepada pemerintah Mangkoenegoro Kooti, 10 Ku-Gatsu 2603 (10 September 1943); Setjadiningrat (Fuku Kencho) kepada Mangkoenegoro Kooti, 24 Maret 1943, dalam "Bendel Masalah Tanaman Djarak, 1943-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.105.
- 56 Soerakarta Koti Jimu Kyoku keizabu kepada Solo dan Mangkoenegaran Koti, 30 Agustus 2603, dalam "Bendel Masalah Tanaman Djarak, 1943-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.105.
- 57 Hardjowiratmo kepada Soerakarta Kochi Jimu Kyoku Chokan, 29 Ichi-Gatsu 2603 (29 Januari 1943), dalam "Bendel Masalah

- Tanaman Djarak, 1943-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.105.
- 58 Keizabui kepada Solo dan Mangkoenegaran kooti. Bendel Masalah Tanaman Djarak, 1943-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.105.
- 59 Seruan Mangkoenegaran dan Solo Koti Zimu Tyokan dalam "Bendel Masalah Tanaman Djarak, 1943-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.105.
- 60 M. Ohtsu (*Senda Shokai*) kepada Soerakarta Kooti, 3 Juni-Gatsu 2603 (3 Desember 1943), dalam "Bendel Masalah Tanaman Djarak, 1943-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.105.
- 61 Aiko Kurasawa (1993), *op. cit.*, hlm. 37.
- 62 Tjara Mengoempoeikan Boeah Djarak, dalam "Bendel Masalah Tanaman Djarak, 1943-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.105.
- 63 Tjara Membagi Minjak Tanah, dalam "Bendel Masalah Tanaman Djarak, 1943-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.105.
- 64 Wawancara dengan Soekarman (84), 1 Januari 2000, pukul 16.00-18.00.
- 65 Boepati Pangreh Praja Wonogiri kepada Prodjo Mangkoenegaran, dalam "Bendel Tentang Minjak tanah, Minjak Katjang dan Klentig", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.186.
- 66 *Gunseikanbu* kepada Boepati daerah Solo Koti Dan Mangkoenegaran Koti, dalam "Bendel Tentang Minjak Tanah, Minjak Katjang dan Klentig", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.186.
- 67 "Bendel Tentang Minjak Tanah, Minjak Katjang dan Klentig", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.186.
- 68 Aiko Kurasawa (1993), *op. cit.*, hlm. 30.
- 69 *Ibid.*
- 70 "Bendel Masalah-Masalah Pembagian Pakaian", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S. 1236; lihat pula: "Bendel Pembagian Kain, 1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.1567.
- 71 Cara seperti ini berlaku pula di Pekalongan, Brebes dan Tegal. Lihat: Anton Lucas, *op. cit.*, hlm. 77.
- 72 Bendel Pembagian Kain, 1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.1567.
- 73 Wawancara dengan Bp. Atmanto; Bp. Soekarman, 1 Januari 2000, 16.00-18.00.
- 74 *Kan Po*, no. 10, Pebruari 2603.
- 75 Aiko Kurasawa (1993), *op. cit.*, hlm. 34.
- 76 Wawancara dengan Bp. Atmanto; Bp. Soekarman, 1 Januari 2000, 16.00-18.00.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Sumber Primer

- Asia Raja*, no. 59, 27 Djoeni 2602.
- "Bendel Masalah Tanaman Djarak, 1943-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S. 105.
- "Bendel Masalah-Masalah Pembagian Pakaian", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S. 1236
- "Bendel Pembagian Kain, 1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.1567.
- "Bendel Pengoempoeian Padi Oentoek Djepang I", *Arsip Rekso Pustoko* no. S. 1578.
- "Bendel Pengoempoeian Padi Oentoek Djepang II", *Arsip Rekso Pustoko* no. S. 1579.
- "Bendel Pengoempoeian Gapek dan Katjang, 1944-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S. 1366.
- "Bendel Rahasia Djepang 1943-1945", *Arsip Rekso Pustoko*, no. 155.
- "Bendel Tentang Minjak tanah, Minjak Katjang dan Klentig", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.186.
- Berita Pemerintah *Kan Po*, no. 10, Pebruari 2603.
- Berita Pemerintah *Kan Po*, no. 32, Desember 2603
- Berita Pemerintah *Kan Po*, no. 48, Agustus 2604.
- Berita Pemerintah *Kan Po*, no. 60, Pebruari 2605.
- "Dasar Peratoeran tentang Melakoekan Pemilikan Padi Oentoek Daerah Soerakarta Kochi dalam Tahoen Showa 20", *Arsip Rekso Pustoko*, no. S.1321.
- "De Rijspostitie van Nederlandsch-India" tahun 1937-1941
- "Kejadian-Kejadian di Puro Mangku-negaran dalam Maret - April 1942", dalam *Arsip Perpustakaan Mangku-negaran*, no. 1459.
- "Mangga Kita Nanem Djarak, Wonten ing Kebon Oetawi Pekawisan: Kita Baktekaken Kagem Garoeda Angkasa", Selebaran Jepang yang dikeluarkan oleh *Sendenbu*, tahun 2602.

Seruan "Yasjima" dalam *Asia raja*, no. 59, 27 Djoeni 2602.

"Tentang Petoeton", *Arsip Rekso Pustoko* no. S. 1594.

## B. Sumber Sekunder

A.B. Lopian dan J.R. Chaniago. 1988. *Di Bawah Pendudukan Jepang: Kisah Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya*, Jakarta: ANRI.

A.H. Nasution. 1988. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid I., Bandung: Angkasa.

Elsbree, Williard H. 1953. *Japan's Rule in South-east Asia Nasionalist Movement's 1944-1945*, Massachuset.

Kahin. 1995. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan UNS Press.

Kanahele, George S. 1967. "The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence", Ph.D. Tesis, Cornell University.

Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol: Study tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Gramedia.

Lucas, Anton. 1989. *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Menif, *Sejarah TNI Surakarta*, Surakarta: nt

Nagayumi, Akira, ed. 1988. *Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang* Jakarta: Yayasan Obor.

Nugroho Notosusanto. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

O.D.P. Sihombing. 1962. *Pemuda Indonesia Menantang Fasisme Djepang*, Jakarta: Sinar Djaya.

Pamudji, "Eling-Eling Jaman Jepang" *Majalah Penjebar Semangat*, no. 41, 7 Oktober 1989

Ricklefs, M.C. 1995. *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sartono Kartodirdjo. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (Dari Imporium Sampai Imperium)*, Jakarta: PT. Gramedia.

Soebagijo, I.N., "Jepang Anggejawa: 45 Taun Kepungkur, Seminggu Perang ing Tanah Jawa", *Majalah Jaya Baya*, no. 29, 15 Maret 1987

Soewidji, *Kisah Nyata Di Pinggir Jalan Slamet Riyadi di Surakarta*, Semarang: Percetakan Satya Wacana, nt.

Suhartono W. Pranoto. 2001. *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*, Yogyakarta: Lapera.

Wild Collin, dan Peter Carey. 1986. *Gelora Api Revolusi*, Jakarta: Gramedia.